

## MEREBUT PEMILIH PEMULA

Indra Kertati  
[kertati@yahoo.com](mailto:kertati@yahoo.com)

### ABSTRAKSI

Pemilihan parlemen Indonesia akan diadakan pada 2019 untuk memilih legislatif nasional (DPR), legislatif lokal (DPRD) juga untuk memilih presiden untuk Indonesia. Ini akan memberi peluang, terutama pemilih baru untuk membangun dan mengembangkan proses demokrasi dengan cara yang baik. Dalam beberapa laporan, ditemukan bahwa pemilih muda memiliki partisipasi terendah di antara yang lain. Mereka tampaknya tidak cukup peduli dalam situasi politik negara mereka. Mereka cenderung lebih menyukai politik egaliter dengan bergabung dalam kekuatan sosial untuk mendukung sisi marjinal. Untuk mengumpulkan lebih banyak pemilih muda, beberapa strategi khusus diperlukan untuk mensinergikan apa yang dilakukan pemuda di komunitas mereka dan para kandidat legislatif. Penggunaan metode rekrutmen menghibur dan strategi multimedia untuk menarik perhatian kaum muda adalah salah satu dari banyak pilihan menarik yang dapat digunakan untuk menarik mereka untuk memilih dalam pemilihan.

Kata kunci: pemilih baru, pemilihan dan partisipasi politik

### ABSTRACT

*Indonesian's parliament election will be held on 2019 to elect national legislative (DPR), local legislative (DPRD) also to elect president for Indonesia. This will give a chance, especially newly voters to build and develop a democracy process in a good way it should. In some report, found that young voters have a lowest participation among others. They seem don't care enough in their nation's political situation. They tend to favor more in egalitarian politics by joining in social forces to support the marginal side. To gather more young voters, some special strategies needed to synergy what the youth did in their communities and the legislative candidates. The use of entertaining recruitment methods and multimedia strategies to attract the attention of young people is one of many interesting options that can be used to attract them to vote in the election.*

**Keywords:** new voters, election and political participation

### A. Pendahuluan

Pemilihan umum yang digelar untuk memilih anggota legislatif periode 2019-2024, akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019<sup>1</sup>. Tahapan Pendaftaran calon anggota DPD sudah berjalan sejak 26 Maret-26 April 2018, sedangkan pendaftaran anggota DPR dan DPRD tanggal 4-17 Juli 2018. Menilik dari berlakunya Undang-Undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum akan menjadi ajang pertarungan hebat karena bukan saja memilih anggota legislatif namun juga pemilihan Presiden Republik Indonesia.

Partai politik sudah menyiapkan diri untuk meraih

suara, intrik politik sudah mulai ditebarkan, bahkan beberapa kasus kemenangan pada pilkada diangkat sebagai alternatif dalam meraih suara. Potensi pemilih untuk tahun 2018 pada pilkada serentak hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sebanyak 160.756.143 jiwa, terdiri dari laki-laki 80.608.811 jiwa dan perempuan 80.147.332 jiwa<sup>2</sup>. Jumlah pemilih ini merupakan 31 provinsi yang akan menggelar pilkada yang terdiri dari 381 kabupaten/kota, 5.564 kecamatan, dan 64.526 kelurahan. Hanya ada tiga provinsi yang melakukan pemilihan serentak 2018 yakni DKI

<sup>1</sup> KPU Indonesia, Siaran Pers 2 Oktober 2017 diunduh tanggal 5 April 2018.

<sup>2</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/12/04/21000011/jumlah-pemilih-potensial-pilkada-serentak-2018-capai-160-juta-jiwa>. Diunduh tanggal 4 April 2018

Jakarta, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan jumlah pemilih dari Daftar Penduduk Potensial Penduduk (DP4) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 160,765,143 jumlah pemilih yang telah memiliki hak suara, terdapat 10 juta pemilih pemula, termasuk yang tanggal 27 Juni atau hari-H Pilkada itu berusia 17 tahun. Data tersebut belum termasuk anak-anak di bawah 17 tahun yang sudah menikah yang berjumlah 5.630 orang.<sup>3</sup> Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 menunjukkan bahwa penduduk usia 15-24 tahun mencapai 42.061,2 juta atau sebesar 16,5 persen dari total penduduk Indonesia.<sup>4</sup> Bulan Agustus tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mencapai 192,079,416 jiwa sedangkan jumlah penduduk usia 15-19 tahun sebesar 24.074.997 jiwa. Jika diasumsikan pemilih pemula adalah penduduk usia 15-19 tahun maka potensi yang layak direbut adalah 12,5% dari total seluruh penduduk usia 15 tahun keatas.

Potensi besar ini belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh sebagaimana besar pemilih pemula, mengingat persyaratan untuk menjadi pemilih harus menggunakan KTP Elektronik. Problem ini nampaknya sederhana, namun jika diperhatikan dalam berbagai kasus yang muncul, ini bukan lagi persoalan yang mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat.

## B. Pemula dalam Pemilu

Pemilih pemula selalu menjadi incaran partai politik. Pemilih pemula dikonstruksikan sebagai pemilih yang labil dan gampang untuk dipengaruhi. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan syarat seseorang menjadi pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.<sup>5</sup> Dengan demikian seorang dikatakan sebagai pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17 tahun pada saat hari pencoblosan, belum pernah memilih, atau mereka yang sudah menikah atau pernah menikah walaupun belum mencapai usia 17 tahun dan belum pernah menggunakan hak pilihnya.

Jumlah pemilih pemula sebagaimana disebutkan oleh KPU cukup potensial, mereka tersebar di seluruh pelosok dengan berbagai dinamika dan budaya yang beragam. Incaran Partai Politik terhadap pemilih pemula ini didasarkan pada kondisi pemilih pemula yang dianggap mampu diatur dan digiring dalam menentukan pilihannya. Sayangnya pola-pola rekrutmen suara pemilih pemula oleh partai politik acapkali tidak memperhatikan baik usia maupun dinamika para pemilih pemula. M. Rusli Karim (1991)<sup>6</sup> memandang pemilih pemula yang sebagian besar adalah para pemuda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan diduga merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik. Pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai, hanya cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya.

<sup>3</sup><https://news.idntimes.com/indonesia/linda/pilkada-2018-10-juta-pemilih-pemula-terancam-tak-bisa-memilih-1/full> diunduh tanggal 4 April 2018.

<sup>4</sup><http://ldfebui.org/wp-content/uploads/2017/08/BN-06-2017.pdf>, diunduh 5 April 2018.

<sup>5</sup> UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 1 ayat 34

<sup>6</sup>M. Rusli Karim. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Suhartono (2009)<sup>7</sup> mencatat pemilih pemula mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, dengan kelompok sebaya. Para pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, menempatkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Oleh karena itu pilihan mereka acapkali tidak dapat diprediksi tidak sesuai harapan partai politik, tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itulah banyak partai politik yang kemudian memanfaatkan moment ini dengan aktifitas yang cenderung sedikit glamor, dan tidak bersifat substantif. Akibatnya bisa diduga bahwa para pemilih pemula ini tidak dapat diandalkan sebagai pemilih setia.

Persoalan pemilih pemula memang bukan hanya persoalan Indonesia, beberapa negara termasuk Amerika Serikat memberikan porsi yang cukup besar dalam mengelola pemilih pemula yang dikuasai oleh para pemuda. Dimasukkannya pemuda dalam politik formal adalah penting, sebagaimana pemberontakan rakyat Amerika Serikat tahun 2011/2012 yang populer dan berbagai gerakan pendudukan telah ditunjukkan,

membuat pemerintah dan partai politik memperhitungkan potensi pemuda ini. Ketika protes yang dipicu pemuda telah memaksa rezim otoriter dari kekuasaan, frustrasi yang signifikan kemungkinan akan muncul jika pemuda tidak termasuk dalam pengambilan keputusan formal baru. Ini dapat mengacaukan demokratisasi dan mempercepat dinamika konflik. Komunitas internasional telah mengakui pentingnya pemuda yang berpartisipasi dalam sistem politik, termasuk melalui beberapa konvensi internasional dan resolusi PBB. Sejalan dengan komitmen ini, UNDP memandang pemuda sebagai kekuatan positif untuk perubahan sosial transformatif, dan bertujuan untuk membantu meningkatkan partisipasi politik pemuda. Prinsip dasarnya adalah bahwa dukungan untuk partisipasi politik pemuda harus diperluas ke siklus pemilu. Pengembangan kapasitas untuk kandidat muda, telah terbukti lebih efektif sebagai upaya berkelanjutan daripada sebagai satu kali peristiwa tiga bulan sebelum pemilihan. Orang-orang muda yang berpartisipasi aktif di komunitas mereka sejak awal lebih mungkin menjadi warga yang terlibat dan pemilih.<sup>8</sup>

Dalam teori siklus hidup, pemilih pemula yaitu para kaum muda tidak seperti orang tua yang telah disosialisasikan dan sumberdaya memiliki sumber daya akumulatif melalui siklus kehidupan yang dialuinya. Ada akumulasi pengetahuan yang memberi kontribusi bagi kemampuan dalam memilih calon yang sesuai harapan. Sebagai pendatang baru dalam partisipasi politik, orang muda cenderung apatis, kurang minat dan tidak memiliki koneksi dengan politik (Henn, Weinstein, dan

---

<sup>7</sup>Suhartono. 2009. Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat). UPI. Bandung.

---

<sup>8</sup>Enhancing Youth Political Participation Throughout The Electoral Cycle

Forrest 2005)<sup>9</sup>. Mereka kurang mengikuti berita politik dan mendiskusikan politik serta menunjukkan komitmen yang relatif lemah terhadap partai politik. Pada periode berikutnya menginjak dewasa orientasi politik akan terbangun yang memungkinkan mereka untuk lebih berpengalaman dalam proses pemilu dan politik. Bukti empiris apatisisme pemilih pemula ditemukan di Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Alasan yang umum dikemukakan adalah karena politik bersangkutan dengan lembaga formal pemerintahan, yang membentuk perilaku politik dalam pemungutan suara pemilu yang memuakkan dalam pikiran mereka (Henn et al., 2002).<sup>10</sup>

Pemungutan suara bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi politik. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa bentuk-bentuk baru partisipasi telah mengalihkan kaum muda dari bentuk-bentuk tradisional keterlibatan politik yang dilakukan oleh generasi yang lebih tua (Norris 2003)<sup>11</sup>. Semakin banyak orang-orang muda yang bergeser orientasi politik mereka yang lebih menikmati bergabung dengan politik konsumen, mengajukan petisi, demonstrasi, protes dan lobi. Kecenderungan ini mulai diikuti oleh pemilih pemula, pemilih yang

yang didominasi orang-orang muda di Cina, Filipina, Indonesia, Mongolia, dan Singapura, yang dahulu lebih banyak berpartisipasi dalam pemilu kini cenderung lebih banyak meluapkan partisipasi politik melalui media yang dianggap lebih terbuka dan tidak beresiko.

Memilih memula memiliki gaya hidup dalam menghadapi berbagai masalah 'permulaan' yang menghadang mereka. Pemilih pemula harus dipandang sebagai kelompok khusus dengan keadaan dan keprihatinan khusus mereka sendiri. Pleyers (2005)<sup>12</sup> menegaskan bahwa pengaruh dari individualisme dan kekecewaan terhadap politik, demokrasi, dan institusi, mengakibatkan pemilih pemula mengembangkan bentuk partisipasi yang kurang dilembagakan dan lebih individual. Pemilu bukan satu-satunya bentuk partisipasi kaum pemilih pemula, namun penolakan terhadap partisipasi politik konvensional seperti pemilu ini tetap menjadi isu krusial di negara demokrasi.

### C. Orientasi Politik

Pemilu memainkan peran penting dalam sistem demokrasi. Pemilu adalah mekanisme utama yang mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat. Otoritas tertinggi terletak pada orang-orang yang mendelegasikan wewenang kepada perwakilan partai politik dalam proses pemilihan. Pemilu memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi menyalurkan hak suara atas kedaulatan yang dimiliki. Partisipasi dalam pemilu menjamin representasi yang setia dari kehendak rakyat dan dengan

---

<sup>9</sup> Henn, Matt, Mark Weinstein, and Sarah Forrest. 2005. "Uninterested Youth? Young People's Attitudes towards Party Politics in Britain." *Political Studies*, Vol. 53: 556–578

<sup>10</sup> Henn, Matt, Mark Weinstein, and Dominic Wring. 2002. "A Generation Apart? Youth and Political Participation in Britain." *British Journal of Politics and International Relations*, Vol. 4(2):167–92

<sup>11</sup> Norris, Pippa. 2003. "Young People and Political Activism: From the Politics of Loyalties to the Politics of Choice?", Paper presented to the Council of Europe Symposium, Young People and Democratic Institutions: From Disillusionment to Participation, Strasbourg, 27–28 November.

---

<sup>12</sup> Pleyers, Geoffrey H., 2005. "From Disillusionment to a New Culture of Participation." In: J. Forbrig, ed. *Revisiting youth political participation*. Strasbourg: Press of the Council of Europe. Council of Europe Publishing

demikian mencegah distorsi. Partisipasi warga dalam pemilu menegaskan dukungan mereka untuk perubahan kehidupan berbegara maupun kehidupan dalam tatanan politik. Hal ini mempromosikan bukan saja menstabilas prosws politik warga, tetapi inheren diinginkan pada alasan normatif. Menurut teori demokrasi, hak untuk memilih dalam pemilihan tidak hanya dijamin secara universal, namun harus dilakukan untuk menjamin hak warga negara dalam berpolitik.

Keterlibatan orang muda dalam berpolitik dapat mengambil berbagai bentuk, seperti halnya kelompok usia lainnya. Pemilu hanya merupakan salah satu elemen dari repertoar partisipasi politik yang jauh lebih luas, dan tindakan demokratis paling mendasar yang harus dilakukan. Kaum muda harus memilih untuk memastikan keseluruhan jumlah pemilih yang tinggi. Semakin besar kelompok (sebagai persentase dari semua pemilih yang memenuhi syarat) dan semakin rendah jumlah pemilih kelompoknya, semakin banyak hal itu akan menekan tingkat partisipasi pemilih. Orang muda mungkin memiliki kepentingan politik yang berbeda dari pemilih yang lebih tua dan yang harus diwakili. Asumsinya adalah bahwa pemungutan suara akan mempengaruhi sifat representasi dan akhirnya isi kebijakan publik. Jika orang muda tidak memilih, dan kepentingan mereka yang berbeda lebih cenderung diabaikan oleh pembuat kebijakan, bisa dipastikan akan terjadi penurunan jumlah pemilih.<sup>13</sup>

Alex Chuan-Hsien Chang<sup>14</sup> mengklasifikasikan pemuda ke dalam empat kelompok dalam politik formal dan informal. Bagi mereka yang hampir tidak pernah memilih dalam pemilu dan berpartisipasi dalam politik informal, dimengidentifikasi sebagai kelompok apatis politik. Kelompok kedua adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan pemilihan resmi, masuk dalam klasifikasi kewarganegaraan. Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilu, tetapi dengan antusias berpartisipasi dalam politik informal, diklasifikasikan sebagai aktivis politik karena alih-alih mengandalkan politik perwakilan, mereka menggunakan pengaruh melalui pendekatan informal seperti melobi, mengajukan petisi, atau demonstrasi. Kelompok keempat adalah mereka yang tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi juga melobi, mengajukan petisi, demonstrasi, protes, masuk sebagai aktivis yang pandai. Dengan membandingkan empat jenis sikap anak-anak muda terhadap politik, dapat mengetahui mengapa pemuda tidak memilih dan mengapa aktivis terlibat dalam partisipasi informal.

Berdasarkan klasifikasi di atas, ada contoh kasus yang menunjukkan distribusi partisipasi pemuda di negara-negara Asia Timur. Negara-negara demokrasi yang maju umumnya memiliki proporsi penduduk muda yang tinggi yang enggan memilih. Keterasingan kaum muda dari politik arus balik mungkin disebabkan oleh kekecewaan umum mereka terhadap kinerja pemerintah. Misalnya, pada Februari 2009, peringkat persetujuan Perdana

---

<sup>13</sup> Involving Today's Young In Tomorrow's Democracy, 1999, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).

---

<sup>14</sup> Alex Chuan-Hsien Chang, 2012, Youth Participation in East Asia, The Institute of Political Science, Academia Sinica (IPSAS) Asian Barometer Survey September Taipei.

Menteri Jepang Aso turun menjadi 19%, yang mengakibatkan kekalahan Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilihan umum ke-45. Meskipun Partai Demokrat Jepang menggantikan LDP, warga Jepang tetap tidak puas dengan Perdana Menteri Hatoyama dan pemerintahannya. Pada Mei 2010, kabinet Hatoyama mendapat peringkat persetujuan yang memalukan sebesar 21 persen. Demikian pula, di Taiwan, Presiden KMT Ma Yin-jeou mengalahkan DPP dan mengambil kembali dominasi pada tahun 2008, namun demikian, peringkat persetujuannya turun menjadi 21% pada bulan September.<sup>15</sup>

Berbeda dengan demokrasi yang maju, tingkat partisipasi pemilih pemuda di negara-negara berkembang tampak lebih tinggi, kecuali Filipina di mana pemilihan kompetitif dan reguler telah diadakan sejak tahun 1992, tetapi kualitas pemerintahan terbukti mengecewakan. Partisipasi pemuda Mongolia yang tinggi terutama disebabkan oleh instalasi baru pemilihan demokratis. Bagi warga yang telah diperintah di bawah Soviet Mongolia, mekanisme demokratis baru yang menginspirasi mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Tingkat partisipasi pemuda yang tinggi di Thailand dan Indonesia disebabkan oleh pemungutan suara wajib dan perwakilan proporsional dari sistem pemilu. Ini dapat disimpulkan bahwa bahwa rezim hibrida dan rezim otoriter memiliki variasi yang cukup besar dalam partisipasi pemuda mereka. Sementara Kamboja dan Vietnam tingkat partisipasi pemuda tinggi karena perubahan politik baru pemilu, Cina, Singapura, dan Malaysia merasa justru rendah tingkat partisipasi

dalam pemilu, bahkan Singapura, sekitar 70% pemilih muda hampir tidak memberikan suara dalam pemilihan umum.<sup>16</sup>

Empat kelompok tersebut dirumuskan untuk melihat partisipasi politik yang berkembang. Ini akan mempengaruhi bukan sekedar jumlah, namun dapat diprediksikan partisipasi yang lebih luas yaitu pada pembangunan yang membawa implikasi baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orientasi politik ini dipengaruhi banyak hal, terutama adalah makin terbukanya akses informasi, sehingga setiap orang memiliki hak politik yang tidak dapat diraba oleh siapapun untuk diekspresikan. Dukungan petisi, atau dukungah melalui media sosial adalah bentuk lain dari orientasi politik anak muda yang baru tahun 2019 ini mengikuti pemilu, dan terbukti ampuh untuk membawa isu petisi sebagai bentuk partisipasi politik terhadap perubahan kebijakan publik.

#### D. Partisipasi Politik

Ada tiga hal besar yang dapat diidentifikasi tentang partisipasi politik kelompok muda yaitu perspektif psikologis, persepsi terhadap kelembagaan politik dan modal sosial. Pirie dan Worcester (2000)<sup>17</sup> menemukan bahwa perubahan sosial yang cepat mempengaruhi aspek psikologis bagi kelompok muda yang baru menentukan hak politiknya. Para pemilih pemula harus menghadapi tekanan politik orang-orang dewasa yang mengakibatkan keterasingan bahkan apatisisme. Para pemilih pemula masih belum memiliki kesadaran untuk penentuan pilihan

<sup>15</sup> Op cit Alex Chuan-Hsien Chang ,2012, hal 7

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Pirie, Madsen, and Robert Worcester. 2000. *The Big Turn-Off: Attitudes of Young People to Government, Citizenship and Community*. London: Adam Smith Institute

atas nasib sendiri maupun dalam konteks negara. Sifat individualistik yang masih melingkupi melemahkan tujuan akan kepemilikan bersama, serta hubungan antara individu dan negara (Mulgan dan Wilkinson 1995, 10)<sup>18</sup>. Para pemilih pemula tidak tertarik pada isu-isu sosial dan politik dan mengubah fokus yang memiliki daya juang pada isu-isu baru seperti tunawisma, lingkungan, kesehatan, pendidikan, perang, urusan internasional, dan gender. Secara obyektif, seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, anak-anak muda Asia telah dilengkapi dengan tingkat pendidikan dan kapasitas yang lebih baik, yang seharusnya memungkinkan mereka untuk terlibat dalam politik, namun harus diakui secara subyektif, mereka merasa politik formal tidak memenuhi keprihatinan mereka atau memenuhi kebutuhan mereka. Mereka belum berani berfikir dan bertindak menentukan pilihan pada ranah kontribusi suara yang akan membuat perbedaan keadaan suatu negara. Oleh karena itu, beberapa dari mereka mengisolasi diri dari lingkungan politik dan menunjukkan kekecewaan dan ketidakpedulian terhadap politik. Aktivis lainnya lebih fokus pada "kehidupan-politik", yang berpusat pada pengalaman individu dan beralih ke bentuk-bentuk alternatif partisipasi politik (Henn 2005, 656)<sup>19</sup>.

Keterlibatan pemilih pemula yang didominasi kelompok usia muda dari politik formal dalam hal pemungutan suara, keanggotaan partai dan aktivitas politik

konvensional mencerminkan keluhan mereka terhadap lembaga-lembaga politik, dan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan mereka terhadap politik. Dari sudut pandang kaum muda, struktur politik lama tidak diperlengkapi untuk menangani tindakan-tindakan individual atau isu-isu global. Dengan demikian, pemuda membingkai pertanyaan lama sebagai pertanyaan baru dengan tanggapan baru dengan menanamkan kekhawatiran ini dalam matriks tanggapan individu (Beck 2001; Farthing 2010, 198)<sup>20</sup>. Persepsi terhadap kelembagaan politik dan pemilu telah terstruktur dalam pikiran mereka bahwa pilihan mereka akan menghasilkan hal-hal yang tidak progresif dan terus berkutat pada politik yang dianggap kotor korupsi kolusi dan nepotisme.

Selain persepsi psikologis rendahnya partisipasi pemuda dapat dilihat dari perspektif jejaring sosial. Modal sosial adalah produk dari kegiatan yang disengaja, di mana individu saling terhubung dengan jaringan hubungan sosial yang sedang berlangsung (Huckfeldt 1998, 569)<sup>21</sup>. Melalui jaringan sosial yang intensif, norma-norma sosial, nilai-nilai, kebijakan, dan sikap demokratis yang dibangun terbukti memperkuat posisi mereka dan meningkatkan saling pengertian di antara warga negara, dan untuk menumbuhkan perasaan toleransi, kepercayaan umum dan norma timbal balik (Stolle 2001)<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Mulgan, Geoff, and Helen Wilkinson. 1995. *Freedom's Children: Work, Relationships and Politics for 18-34 Year-olds in Britain Today*. Demos

<sup>19</sup> Henn, Matt, Mark Weinstein, and Sarah Forrest. 2005. "Uninterested Youth? Young People's Attitudes towards Party Politics in Britain." *Political Studies*, Vol. 53: 556–578.

---

<sup>20</sup> Farthing, Rys. 2010. "The Politics of Youthful Antipolitics: Representing the 'Issue' of Youth Participation in Politics." *Journal of Youth Studies*, Vol. 13(2): 181-195.

<sup>21</sup> Hackett, Claire. 1997. "Young People and Political Participation." In: Roche, Jeremy., Stan Tucker eds., *Youth in Society: Contemporary Theory, Policy and Practice*. London: Sage/Open University, 81-88.

<sup>22</sup> Stolle, Dietlind. (2001), "Clubs and Congregations: The Benefits of Joining an

Modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut yang merupakan serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama (Fukuyama, F. (1995)<sup>23</sup> Modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Berbagai permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di berbagai negara determinan utamanya adalah kerdilnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, dan menghalangi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Fukuyama (1999)<sup>24</sup> Unsur-unsur dalam modal sosial yaitu kepercayaan, tumbuhnya sikap saling percaya antar individu dan antar institusi dalam masyarakat;

1. Kohesivitas, adanya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas masyarakat;
2. Altruisme, paham yang mendahulukan kepentingan orang lain;
3. Perasaan tidak egois dan tidak individualistik yang mengutamakan kepentingan umum dan orang lain di atas kepentingan sendiri;

---

Association”, In: Cook, Karen (ed.), *Trust in Society*, New York, Russell Sage Foundation.

<sup>23</sup> Fukuyama, Francis. 1995. *Trust : The Social Virtue and The Creation of Prosperity*, New York Free Press

<sup>24</sup> Fukuyama, Francis, 2001, *Sosial Capital; Civil Society and Development*, Third World Quarterly, Vol 22.

4. Gotongroyong, sikap empati dan perilaku yang mau menolong orang lain dan bahu-membahu dalam melakukan berbagai upaya untuk kepentingan bersama;
5. Jaringan, dan kolaborasi sosial, membangun hubungan dan kerjasama antar individu dan antar institusi baik di dalam komunitas sendiri/ kelompok maupun di luar komunitas/kelompok dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam modal sosial terdapat beberapa unsur. Unsur Modal Sosial Menurut Hasbullah (2006)<sup>25</sup> adalah sebagai berikut:

1. *Participation in a network* yaitu kemampuan orang-orang atau kelompok untuk melibatkan diri dalam jaringan sosial, dengan berbagai variasi yang saling berdampingan, dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*).
2. *Reciprocity* yaitu kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.
3. *Trust* yaitu suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang

---

<sup>25</sup>Hasbullah, Jousairi. 2006. *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press.



didasari oleh perasaan bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

4. *Social norms* yaitu sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial.
5. *Values* yaitu sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, yang tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola cultural.
6. *Proactive action* yaitu keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan

anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok.

Dampak yang ditimbulkan modal sosial adalah meningkatnya partisipasi politik. Modal sosial mampu membangun kepercayaan interpersonal dan kemasyarakatan baik keanggotaan masyarakat formal maupun non formal yang lintas ruang dan sektoral. Untuk memahami efek yang dimilikinya terhadap partisipasi pemilih melalui Modal sosial membuktikan bahwa tingkat kepercayaan antarpribadi dan masyarakat yang lebih tinggi menyebabkan tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi pula. Ini terbukti pada negara-negara demokratis dimana komunitas sosial saling mempengaruhi untuk merebut pengaruh dari para pemilih yang dianggap tidak loyal namun memiliki modal sosial yang besar.

Modal sosial bagi kelompok muda saat ini menjadi trend dalam membentuk kekuatan sosial bersama. Modal sosial dikembangkan melalui media sosial yang dianggap cepat mengakomodir kepentingan bersama. Studi terbaru menunjukkan bahwa orang-orang dengan modal sosial yang berlimpah cenderung berpartisipasi dalam urusan sosial dan politik dan mengambil tindakan kolektif untuk kebaikan bersama (Putnam 2000)<sup>26</sup>. Ada hubungan positif antara modal sosial dan partisipasi politik. Anak-anak muda dengan makin meluasnya jaringan sosial memberi dampak bagi kemampuan beradaptasi dan pengambilan

---

<sup>26</sup> Putnam, Robert D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Touchstone Books by Simon & Schuster; 1st ed.

ketetapan yang lebih bijak. Apatisme politik memiliki relatif sedikit hubungan timbal balik dan keanggotaan. Selain itu, karena tetangga dan anggota komunitas mereka cenderung tidak menyuarakan keluhan mereka, apatis politik lebih memilih untuk tunduk pada urusan publik. Sebaliknya, keanggotaan asosiasi, jaringan timbal balik yang kuat, dan tetangga yang antusias dengan urusan lokal tidak hanya mendorong aktivis muda untuk berpartisipasi dalam politik elektoral, tetapi juga mendorong mereka untuk menggunakan pengaruh mereka melalui pendekatan politik informal.

#### E. Penutup : Meraup Suara

Memperebutkan suara pemilih pemula harus memenangkan mengatasi perasaan keterasingan, ketidakberdayaan, frustrasi, dan kekecewaan mereka terhadap politik. Partai politik, dan pemerintah harus mempromosikan pendekatan yang mudah diakses untuk mendorong partisipasi pemuda. Pendekatan semacam itu, paling tidak, harus memenuhi tiga tuntutan yaitu : (1) harus memastikan pemilih pemula bebas berbicara dan bergaul. Ini menunjukkan hubungan partisipasi mereka dengan persepsi tentang kebebasan. Perbedaan dalam keragaman antara pemilih pemula sebagai aktivis, pun non-aktivis akan membentuk nilai kebebasan bersama dalam berbicara dan berserikat. Kedua, harus mendorong anak muda untuk berinteraksi dengan yang lain dan memupuknya ke modal sosial kumulatif, dan ketiga membuka akses yang luas agar mereka menjadi penting diantara kepentingan yang diusung oleh partai politik.

Pemerintah harus mengembangkan aktivitas yang memungkinkan pemilih pemula

mengejar bentuk politik mereka sendiri. Mereka tidak harus mengikuti bentuk-bentuk partisipasi politik yang dibentuk partai politik sehingga kebebasan mereka terbelenggu, namun harus mendorong dan mengilhami untuk mengejar bentuk partisipasi dan kegiatan mereka. Kegiatan tidak harus "politik", tetapi "saling menguntungkan". Dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai kebutuhan, mereka tidak hanya dapat membantu orang lain, tetapi juga memperoleh pemenuhan diri dari kontribusi mereka, sekaligus mengambil keputusan untuk memilih sesuai dengan aspirasi yang dikuasainya. Artinya suara itu akan melengkapi suara lain kepada partai politik yang mampu menguatkan keberdayaan mereka.

Aktivitas kampanye partai politik harus memberi energi kepada pemilih pemula untuk terlibat dalam masalah sosial yang serius, membiarkan mereka untuk secara praktis membantu anak-anak yang membutuhkan dan memungkinkan sukarelawan muda untuk mengobrol satu sama lain untuk berbagi pengalaman mereka. Kegiatan kampanye harus menginspirasi, pemilih pemula yang sebagian besar adalah anak-anak muda tidak hanya menjadi pendengar dan meramai kampanye, bahkan mereka dapat memberikan kontribusi dan menghasilkan perubahan nyata. Secara terstruktur pemerintah harus mencoba memasukkan para pemilih muda dalam proses pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka untuk memiliki lebih banyak suara dalam tindakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri.

Partai politik dan pemerintah dapat mempromosikan partisipasi secara elektronik dalam politik, termasuk diskusi online, asosiasi visual, dan ruang obrolan politik. Pemanfaatan teknologi informasi

akan mendorong partisipasi politik pemilih pemula sehingga mereka merasakan kenyamanan, aksesibilitas, menciptakan mekanisme baru untuk mengatur asosiasi, dan menyampaikan informasi tanpa intervensi dari pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alex Chuan-Hsien Chang, *Youth Participation in East Asia, The Institute of Political Science, Academia Sinica (IPSAS) Asian Barometer Survey September Taipei* (2012).
- Farthing, Rys., *The Politics of Youthful Antipolitics: Representing the 'Issue' of Youth Participation in Politics*, *Journal of Youth Studies*, Vol. 13 (2): 181-195 (2010)
- Fukuyama, Francis. , *Sosial Capital; Civil Society and Development, Third World Quarterly*, Vol 22. (2001)
- Fukuyama, Francis., *Trust : The Social Virtue and The Creation of Prosperity*, New York Free Press (1995)
- Hackett, Claire., *Young People and Political Participation* In: Roche, Jeremy., Stan Tucker eds., *Youth in Society: Contemporary Theory, Policy and Practice*. London: Sage/Open University, 81-88. (1997)
- Hasbullah, Jousairi., *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press (2006)
- Henn, Matt, Mark Weinstein, and Dominic Wring., *A Generation Apart? Youth and Political Participation in Britain*. *British Journal of Politics and International Relations*, Vol. 4(2):167-92 (2002)
- Henn, Matt, Mark Weinstein, and Sarah Forrest. 2005. "Uninterested Youth? Young People's Attitudes towards Party Politics in Britain." *Political Studies*, Vol. 53: 556-57 (2005)
- M. Rusli Karim., *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.(1991)
- Henn, Matt, Mark Weinstein, and Sarah Forrest., *Uninterested Youth? Young People's Attitudes towards Party Politics in Britain*. *Political Studies*, Vol. 53: 556-578. (2005).
- Mulgan, Geoff, and Helen Wilkinson. *Freedom's Children: Work, Relationships and Politics for 18-34 Year-olds in Britain Today*. Demos. (1995)
- Norris, Pippa., *Young People and Political Activism: From the Politics of Loyalties to the Politics of Choice*, Paper presented to the Council of Europe Symposium, Young People and Democratic Institutions: From Disillusionment to Participation, Strasbourg, 27-28 November (2003).
- Pleyers, Geoffrey H., 2005. *From Disillusionment to a New Culture of Participation*. In: J. Forbrig, ed. *Revisiting youth political participation*. Strasbourg: Press of the Council of Europe. Council of Europe Publishing
- Pirie, Madsen, and Robert Worcester. 2000. *The Big Turn-Off: Attitudes of Young People to Government, Citizenship and Community*. London: Adam Smith Institute
- Putnam, Robert D., "*Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*". Touchstone Books by Simon & Schuster; 1st ed.(2000)
- Stolle, Dietlind., *Clubs and Congregations: The Benefits of Joining an Association*, In: Cook, Karen (ed.), *Trust in Society*, New York, Russell Sage Foundation(2001)
- Suhartono. *Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School* (2009)
- KPU Indonesia, *Siaran Pers 2 Oktober 2017 diunduh tanggal 5 April 2018*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/04/21000011/jumlah-pemilih-potensial-pilkada-serentak-2018->

capai-160-juta-jiwa. Diunduh  
tanggal 4 April 2018

<https://news.idntimes.com/indonesia/linda/pilkada-2018-10-juta-pemilih-pemula-terancam-tak-bisa-memilih-1/full> diunduh tanggal 4 April 2018.

<http://ldfebui.org/wp-content/uploads/2017/08/BN-06-2017.pdf>, diunduh 5 April 2018.

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu  
Involving Today's Young In

Tomorrow's Democracy, 1999,  
International Institute for  
Democracy and Electoral  
Assistance (International IDEA).

Based democracy Education (Studi  
Kasus Pilkada Provinsi Banten  
Jawa Barat). UPI. Bandung.

Enhancing Youth Political Participation  
Throughout The Electoral Cycle